



JURNAL BASICEDU

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021 Halaman 1183 - 1190

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Robiatul Munajah^{1✉}, Arita Marini², Mohamad Syarif Sumantri³

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Trilogi¹

Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta^{2,3}

E-mail: nengrobiatulmunajah@trilogi.ac.id¹, aritamarini@unj.ac.id², syarifsumantri@unj.ac.id³

Abstrak

Sekolah Dasar dengan program pendidikan inklusi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan. Pendidikan inklusi di sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat siswa sekolah dasar yang masih perlu perhatian intensif dari pendidik ditambah dengan kehadiran siswa berkebutuhan khusus, tentunya hal tersebut bukan mudah untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, menganalisis adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, sehingga didapatkan temuan bahwa guru perlu mengetahui lebih banyak mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 13 pandeglang maka kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat perlu bekerjasama dalam implementasi untuk dapat memberikan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusi.

Abstract

Elementary schools with inclusive education programs are a challenge for principals and teachers in educational institutions. Inclusive education in elementary schools needs to get more attention considering that elementary school students still need intensive attention from educators. Moreover, to deal with students with special needs, of course it is not easy to achieve learning goals. The purpose of this study is to see and describe the phenomena that occur in the implementation of inclusive education in elementary schools. This study used a descriptive qualitative method, analyzing the existence of supporting and inhibiting factors in the implementation of inclusive education in elementary schools, so that it was found that teachers need to know more about the supporting and inhibiting factors in the implementation of inclusive education in Pandeglang public elementary schools no 13. The education office and the community need to cooperate in the implementation to provide appropriate services for students and children with special needs as an effort to improve the quality of educational services in primary schools.

Keywords: Policy Implementation, Inclusive Education.

Copyright (c) 2021 Robiatul Munajah, Arita Marini, Mohamad Syarif Sumantri

✉ Corresponding author :

Email : nengrobiatulmunajah@trilogi.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.886>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan layanan dan kesempatan kepada semua anak tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus dan anak dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan bersama-sama anak dengan kriteria pada umumnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) telah menegaskan bahwa “setiap warga berhak untuk mendapatkan pendidikan”; pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa “setiap warga berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi ditengah masyarakat. Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif (Saputra, 2016).

Pendidikan Inklusi masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah regular dalam rangka memberikan hak atas pendidikan untuk semua anak, kemudahan akses pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan olok-olokan. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di kelas, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik (Ilahi, 2016).

Dinas pendidikan kabupaten pandeglang telah lama menerapkan pendidikan inklusi, salah satunya program pendidikan inklusi tersebut diimplementasikan di sekolah dasar negeri 13 kota pandeglang. Kegagalan dan keberhasilan pada sekolah dengan program pendidikan inklusi dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah salahsatunya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Maka dari itu dibutuhkan para pemimpin dan implementator yang mampu dan bersedia melaksanakan kebijakan program pendidikan inklusi tersebut. Apabila kebijakan tidak dijalankan dengan baik, maka akan terjadi kesenjangan implementasi di lapangan yang artinya ada perbedaan antara hukum yang tertulis dan praktik kebijakan di lapangan atau sekolah (Supriatini et al., 2020). *Implementation gap* dapat terjadi karena adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah. Dalam mengatasi *Implementation gap* diperlukan pendekatan dan upaya yang berfokus pada kualitas kebijakan sejalan dengan pttaktik di lapangan, sesuai dengan kebutuhan sasaran masyarakat (Sulthon, 2019).

Sekolah Dasar kehadiran program pendidikan inklusi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kepala sekolah dan guru bahkan masyarakat. Pendidikan inklusi di sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat siswa sekolah dasar yang masih perlu perhatian intensif dari pendidik ditambah dengan kehadiran siswa berkebutuhan khusus, tentunya hal tersebut bukan mudah untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 13 kabupaten pandeglang. Penelitian dilakukan guna untuk melihat adanya kesenjangan antara harapan

dari program yang dirancang dengan pelaksanaan di lapangan khususnya di sekolah dasar negeri 13 pandeglang. Sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bermaksud mendalami dan menghayati suatu obyek mengenai implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri kabupaten Pandeglang. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah metode yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fakta, data, dan objek penelitian secara sistematis dan sesuai dengan situasi alamiah. Terkait hal yang diteliti, hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada hasil, dan hasil penelitian tidak mengikat serta dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan penelitian dan diinterpretasikan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau deskriptif berdasarkan fakta di lapangan (Anggito, A., & Setiawan, 2018). Metode kualitatif dirasa sangat sesuai untuk mampu menjawab tujuan penelitian ini yakni mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 13 kabupaten Pandeglang, serta apa saja upaya yang telah dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek mengenai perolehan data yang telah didapat. Data-data yang kemudian dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber di antaranya: 1) Sumber Data Primer, Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti, dalam mengumpulkan data primer, peneliti harus kontak atau komunikasi langsung dengan subjek ataupun informan dalam penelitian, maka dari itu, pada penelitian ini sumber data yang didapatkan berasal dari subjek atau informan yang akan diwawancarai dan di observasi oleh peneliti yang dilakukan langsung di tempat penelitian; 2) Sumber Data Sekunder, Data sekunder merupakan data pelengkap untuk mendukung data primer.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang mana terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis", Kegiatan analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain :

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pemilihan, di mana peneliti memilah data yang akan di masukkan berdasarkan penting atau tidak terlalu pentingnya data tersebut. Selain itu reduksi data juga dapat dijadikan sebagai proses mengelompokkan data sesuai kategori. Reduksi data dapat mempermudah karena dapat menunjukkan data yang belum jelas menjadi lebih jelas dan urut.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah data dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya yang didapatkan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam teknik analisis data. Di mana kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung berupa bentuk deskripsi atau gambaran suatu obyek yang dikemukakan menjadi kesimpulan yang terpercaya. Berikut gambar proses kegiatan analisis data seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Teknik Analisis Data (Salim, 2019)

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut: Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda, misalnya peneliti sudah melakukan wawancara, data yang didapatkan melalui wawancara lalu dicek lagi dengan observasi secara langsung, kemudian melakukan dokumentasi. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data yang sudah didapatkan oleh peneliti dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis. Bahan referensi disini adalah dengan adanya bukti pendukung untuk memperkuat dan membuktikan data yang sudah ditemukan di lapangan penelitian (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Program pendidikan inklusi di sekolah merupakan kebersamaan peserta didik di kelas dalam lingkungan dan layanan pendidikan yang sama, kebersamaan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini akan membawa suatu pengaruh positif yang sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut di luar sekolah. Kehidupan di lingkungan masyarakat menuntut mereka dapat berbaur serta berinteraksi dengan masyarakat yang sangat beragam. Untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat dengan baik maka perlu menyiapkan mereka sejak belajar di sekolah menjadi suatu keharusan. Peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama, meskipun dengan hambatan dan perbedaan kemampuan yang mereka miliki (Kadir, 2015).

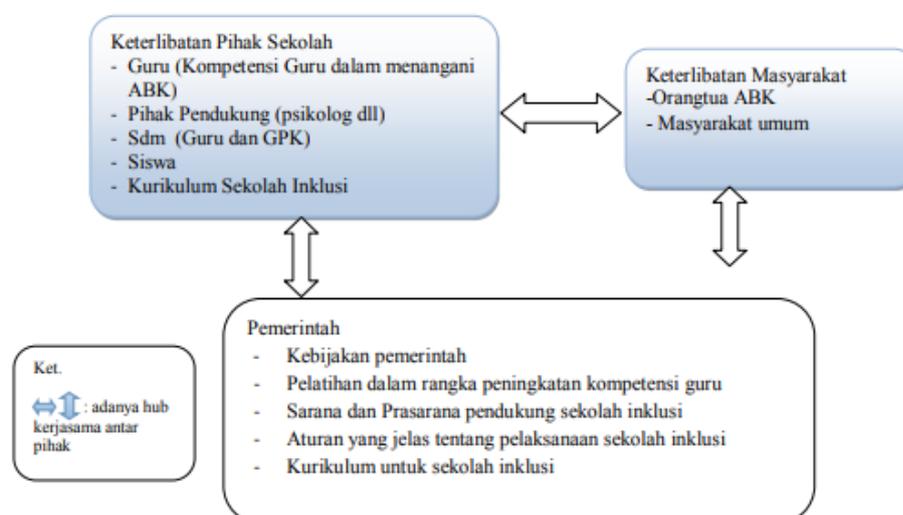
Siswa yang tidak terbiasa bergaul dalam keragaman majemuk di sekolah akan menjadi sulit bergaul dengan lingkungan masyarakat. Kebersamaan siswa di sekolah inklusi ditujukan pula untuk mereduksi kesenjangan agar mereka terbiasa hidup dalam keragaman, sehingga mereka saling mengenal, mengetahui, dan memahami tentang keberadaan setiap individu. Anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pembelajaran dalam hubungannya dengan peserta didik normal, demikian sebaliknya, bahwa peserta didik normal dapat belajar bagaimana mengembangkan sikap untuk bisa menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus (Junanto & Kusna, 2018).

Interaksi antar siswa sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi pengenalan mereka di sekolah akan berlanjut pada interaksi mereka di luar sekolah dalam bentuk komunikasi, silaturahmi antar siswa, dan terkadang melibatkan orang tua serta keluarga, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Hal ini dapat menjadi jalan bagi peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus bahwa sekolah inklusi dapat menjadi model terapi dalam mengurangi kesenjangan kehidupan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Model pendampingan yang dilakukan di sekolah inklusi pada jam belajar atau jam khusus konseling peserta didik dapat menjadi kesempatan upaya pengobatan atau terapis bagi siswa (Dewi, 2017).

Pendidikan inklusi merupakan solusi bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk tidak mengalami tekanan psikologis karena keadaan yang menimpa dirinya. Mengangkat harkat dan martabat anak berkebutuhan khusus, merasa diterima dan tidak terpinggirkan dengan keadaan yang menimpa dirinya akan dapat mendorong aktivitas siswa lebih aktif serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Lembaga pendidikan yang dapat merangkul dan menerima keragaman seharusnya melakukan reorientasi kurikulum, infrastruktur, maupun sistem pembelajaran yang kompatibel dengan kebutuhan individu peserta didik yang beragam (Kadir, 2015). Konsep *education for all* (pendidikan untuk semua) mengisyaratkan perlunya sekolah serta lembaga pendidikan mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi dan pemahaman serta mampu mendidik dan mengajar setiap individu sebagai akibat bahwa *human differences* dan *learning styles differences* dianggap ssebagai sesuatu yang alamiah dan normal (Wati, 2014).

Implementasi kebijakan sekolah inklusi di sekolah dasar perlu ditinjau secara menyeluruh agar diketahui apakah pendidikan inklusi yang telah diterapkan sudah berjalan dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi merupakan aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan pengguna serta dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan yang dirancang dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasi penerapannya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Nurwan, 2019).

Implementasi pada Program Pendidikan dapat dikaji berdasarkan dua variabel menurut Merilee S. Grindle, dua variabel tersebut adalah variabel Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Hasil dan pembahasan penelitian ditemukannya masalah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusi, akan tetapi permasalahan tersebut tidak menghambat jalannya proses implementasi program pendidikan inklusi di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan inklusi telah berjalan dengan baik sesuai dengan target sasaran yang hendak dicapai atas kerjasama kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat (Sudarto, 2016).



Gambar 2. Elemen yang seharusnya terlibat dalam pelaksanaan sekolah inklusi

Berdasarkan hasil penelitian (Tarnoto, 2016) permasalahan yang muncul terkait implementasi program pendidikan inklusi adalah kaitannya guru, siswa, orangtua, sekolah, masyarakat, pemerintah dan masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program sekolah inklusi. Hal ini juga dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak. Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan inklusi, tetapi tanpa adanya bantuan dari pihak lain pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan dengan maksimal, sehingga selain guru yang ditangani, perlu juga menumbuhkan budaya sekolah inklusi baik didalam sekolah itu sendiri ataupun komunitas diluar sekolah tersebut, selain itu kebijakan pemerintah juga sangat menentukan pelaksanaan sekolah inklusi. Dalam pelaksanaan sekolah inklusi perlu adanya persiapan layanan dan sarana prasarana yang menunjang serta dukungan dari pemerintah sehingga implemtasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar dapat terimplementasi dengan baik (Muazza et al., 2018).

Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Inklusi

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dapat diketahui faktor pendukung dari implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 13 kabupaten pandeglang adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat untuk mendukung berjalannya program pendidikan inklusi. Kerjasama tersebut tercermin dalam kebijakan sekolah yang mendorong pelaksanaan program pendidikan inklusi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Faktor pendukung tersebut menjadi keuntungan bagi sekolah dan lingkungan masyarakat serta siswa dalam berinteraksi, bersosialisasi dan toleran terhadap perbedaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Inklusi

Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi tentunya ada faktor penghambat yang menjadi sebuah tantangan bagi kepala sekolah dan guru, masih ada paradigma pandangan masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus sulit untuk ditangani, sehingga menimbulkan adanya complain dari beberapa orang tua murid yang keberatan anaknya disatu kelaskan dengan anak berkebutuhan khusus. Faktor penghambat lainnya masih kurangnya pengetahuan penanganan anak berkebutuhan khusus, dikarenakan guru bukan dari pendidikan luar biasa. Pada umumnya guru di sekolah dasar berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, sehingga memiliki keterbatasan informasi mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus secara spesifik. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi adalah kurikulum yang belum berreorientasi disusun untuk program sekolah inklusi, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi pendidik. Disamping itu sarana pendukung di sekolah belum cukup memadai untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.

Upaya Kepala Sekolah dan Guru dalam Implementasi Pendidikan Inklusi

Lembaga sekolah dan dinas pendidikan terus berupaya melakukan perbaikan dan mencari solusi untuk menangani hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pendidikan inklusi. Upaya yang sudah dilakukan diantaranya: 1) Sosialisasi yang dilakukan bersama komite sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran pada seluruh orang tua murid di sekolah dasar tersebut; 2) Pelatihan dan workshop mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus terus dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu layanan pada implementasi program pendidikan inklusi dan sebagai peningkatan kompetensi guru; 3) Pihak sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan mengadakan pelatihan pengembangan model kurikulum dalam upaya reorientasi kurikulum bagi sekolah inklusi; 4) Sekolah terus berupaya melengkapi sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada sekolah inklusi, dengan bekerjasama dinas pendidikan melalui pemerolehan bantuan dari pemerintah pusat untuk pemenuhan fasilitas pada sekolah inklusi.

Berdasarkan temuan penelitian dilihat dari faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya sekolah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusi di sekolah dasar. Implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar masih perlu diteliti lebih lanjut. Sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya agar program tersebut dapat terimplementasi dengan baik sesuai rancangan program dari pemerintah. Dalam penelitian ini masih terbatas pada kesenjangan antara rancangan program dan implementasi di sekolah dasar negeri pandeglang, untuk mendapatkan data dari berbagai sudut pandang mengenai implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar tentunya masih banyak hal yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut.

KESIMPULAN

Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membentuk generasi penerus bangsa agar dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan serta menghindari sifat diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penyelenggaraannya terdapat faktor pendukung serta penghambat implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 13 pandeglang masih ditemukan beberapa kendala, akan tetapi kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat terus berupaya melakukan kerjasama untuk melakukan peningkatan implementasi agar dapat memberikan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar. Penelitian ini berdampak bagi sekolah dasar negeri 13 kabupaten pandeglang untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan, sehingga upaya yang dilakukan sekolah dapat dievaluasi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Dewi, N. (2017). Manfaat program pendidikan inklusi untuk aud. In *journal.uny.ac.id*.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/15657>
- Ilahi, M. T. (2016). *Pendidikan Inklusif*. Ar-Ruzz Media.
- Junanto, S., & Kusna, N. A. A. (2018). Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusi dengan Model Context, Input, Process, and Product (CIPP). *INKLUSI*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.14421/ijds.050202>
- Kadir, A. (2015). PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA Abd. Kadir (Dosen PAI FTK UIN Sunan Ampel Surabaya). *Pendidikan Agama Islam*, 03, 1–22.
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi Studi Kasus Di Sekolah Dasar Jambi. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2(1), 1–12.
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Salim, H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 3.
- Sudarto, Z. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Zaini Sudarto Prodi Pendidikan Luar Biasa FIP Unesa Abstrak. *Jurnal Pendidikan*, 1, 89–97.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulthon, S. (2019). Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan. *INKLUSI*, 6(1), 151. <https://doi.org/10.14421/ijds.060107>

- 1190 *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar – Robiatul Munajah, Arita Marini, Mohamad Syarif Sumantri*
DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.886>
- Supriatini, S., Muhdi, M., & Yuliejantiningih, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Bolo Kabupaten Demak. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(3), 410–425. <https://doi.org/10.26877/jmp.v8i3.5400>
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat Sd. *Humanitas*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>
- Wati, E. (2014). MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 32 KOTA BANDA ACEH. In *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari* (Nomor 2). www.serambinews.com/.../sd-inklusi-tolak-terima-anak-berkebutuhan-khusus